

BAB IV

ALASAN PENOLAKAN HONGARIA

TERHADAP PENGUNGI TIMUR TENGAH

Hongaria mulai memberikan sinyal penolakan pengungsi sejak tahun 2014. Namun, Hongaria mulai melegalkan sikap penolakannya pada amandemen *Asylum Act CXXVII* pada Juli 2015 dengan membangun tembok di perbatasan Serbia. Penolakan tidak saja berhenti disitu, Hongaria juga dengan tegas menghukum para pencari perlindungan internasional yang melewati batas negara Hongaria. Selain itu, pemerintah Hongaria juga menolak pembagian kuota pengungsi yang diamanahkan oleh Uni Eropa.

Sikap penolakan ini bertolak belakang dengan Hongaria yang menjadi *state parties* dalam *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 (*New York Protocol*). Maka, bab ini akan menjelaskan tentang alasan penolakan Hongaria terhadap krisis pengungsi tahun 2014-2016.

A. Karakteristik Masyarakat Hongaria

Budaya masyarakat Hongaria sendiri mengakar dari sejarah Hongaria yang pernah menjadi kerajaan Kristen Katolik tahun 1000. Aturan-aturan yang berlaku pada saat itu mengikuti hukum Kristen dan mendapat legitimasi dari masyarakatnya. Sehingga, nilai-nilai Kristen sangat mengakar ke masyarakatnya hingga menjadi jalan hidup masyarakatnya hingga sekarang.

Masyarakat Hongaria disamping itu memiliki kebiasaan yang menjadi budaya bangga dan gigih dalam berjuang memperjuangkan nilai-nilai yang dipercayainya. Selain itu, masyarakat Hongaria juga memiliki budaya *ladies first* yang mengapresiasi wanita.

A.1. Karakter Bangga dan Gigih dalam Berjuang

Masyarakat Hongaria memiliki karakter bangga dan gigih terhadap nilai dan kekuatan yang dipunya (Trócsányi, 1939). Masyarakat Hongaria rela berkorban demi hal yang dipercayainya. Masyarakat Hongaria tidak akan segan segan untuk melakukan berbagai usaha untuk menjunjungnya.

Misalnya ketika okupasi Ottoman Turki di Hongaria pada abad ke-15, masyarakat Hongaria berjuang untuk merdeka. Saat Hongaria di bawah pengatuh Ottoman Turki mau tidak mau pengaruh Islam masuk. Namun, masyarakat Hongaria membendung itu dengan memperkuat keyakinan mereka akan Kristen. Sehingga, pada saat itu Ottoman Turki memang menguasai Hongaria, namun masyarakat Hongaria tetap bertahan dengan agama Kristen.

Masyarakat Hongaria berjuang demikian demi melindungi Kristen barat Eropa dari pengaruh Islam Ottoman Turki. Perjuangan merdeka ini akhirnya diraih oleh Hongaria pada abad ke-17. Perjuangan merdeka demi melindungi Kristen barat Eropa inilah yang menjadikan internalisasi kuat nilai yang dipegang teguh akan berbuah manis dikemudian hari.

A.2. Budaya Mengapresiasi Wanita

Seperti negara Eropa pada umumnya, Hongaria sangatlah mengapresiasi wanita. Hal ini ditunjukkan dengan pria mencium tangan wanita setelah berjabat tangan setelah sang wanita memberi sinyal membolehkannya. Beberapa pria Hongaria masih menekuk lutut dan sedikit membungkukkan badan ketika bertemu dengan wanita sebagai tanda hormat.

Wanita akan dipersilahkan untuk masuk duluan ke sebuah ruangan ataupun menggunakan tangga duluan. Pria biasanya menyetir, mendorong kereta dorong, bahkan membawakan barang untuk wanita. Umumnya, pria akan jalan di sebelah kiri wanita. Hal ini berkaitan ketika zaman dahulu pria menancapkan pedangnya di bagian kiri tubuhnya (Chesler, 2006).

Budaya *ladies first* di Hongaria cukuplah kuat hingga sekarang. Wanita bukan dianggap tidak mampu dan stratanya lebih rendah daripada pria. Wanita dianggap memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan pria di Hongaria. Sehingga, hal ini juga yang menjadikan wanita Hongaria mendapatkan hak-haknya dengan baik di Hongaria.

A.3. Nilai Kebebasan Hongaria

Nilai kebebasan dalam Kristen adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah kebebasan merupakan hal yang dinikmati siapa saja asalkan tidak merenggut kebebasan orang lain.

Masyarakat Hongaria beranggapan bahwa negara Hongaria berarti

komunitas orang-orang yang merdeka, diatur dengan keinginan akan kebebasan dan kemerdekaan. Kemerdekaan negara tidak dapat dipisahkan dengan kemerdekaan individu yang hidup di dalam negara itu. Maka, hal yang paling dijunjung adalah kebebasan dalam hidup (Trócsányi, 1939).

Hongaria mencantumkan nilai kebebasan dalam pembukaan konstitusi dasar Hongaria yang isinya :

We hold that human existence is based on human dignity.

We hold that individual freedom can only be complete in cooperation with others. (Hungarian Government, 2013)

Hongaria sangat mengapresiasi martabat manusia. Ini diimplementasikan dengan menjunjung kebebasan di Hongaria. Kebebasan disini adalah kebebasan yang menjadi hak asasi manusia. Hongaria menganut hak asasi manusia yang universal, yaitu asalkan tidak merugikan yang lain maka hak asasi manusia untuk melakukan apapun adalah valid.

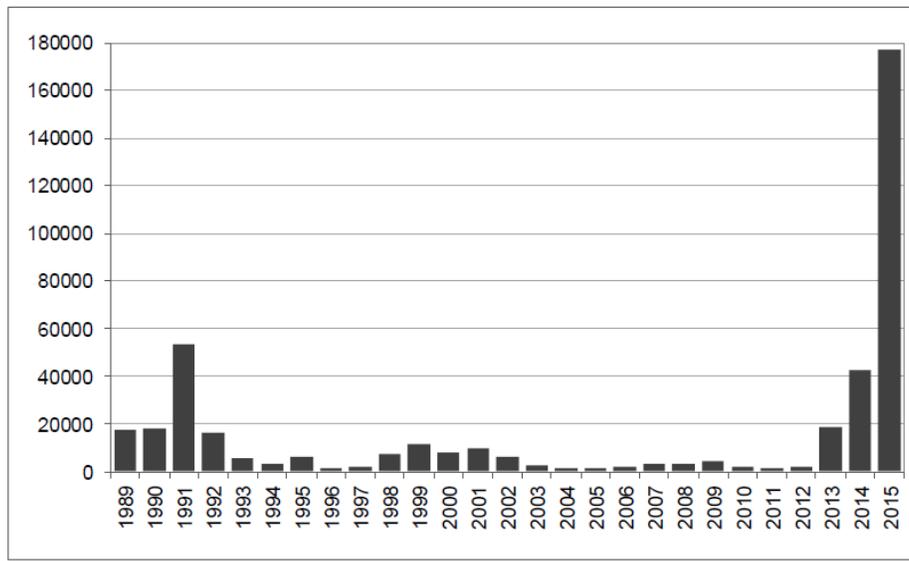
Misalnya Hongaria melindungi kebebasan berbicara individu dan juga media di Hongaria. Sehingga, masyarakat Hongaria memiliki kebebasan akses media dan berekspresi di Hongaria. Kebebasan beragama juga sangat dilindungi di Hongaria. Bahkan, Hongaria juga melindungi kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) dengan adanya larangan diskriminasi terhadap kaum tersebut.

B. Persepsi Hongaria Terhadap Pengungsi

Hongaria menolak pengungsi yang merupakan bentuk xenophobia atau persepsi buruk terhadap orang asing, dalam hal ini pengungsi Timur Tengah. Jauh sebelumnya, etnis Roma (Gypsy) datang ke Hongaria pada abad ke-14 dan 15 dari India. Masyarakat Hongaria masih belum sepenuhnya menerima etnis Gypsy hingga sekarang, sehingga xenophobia terhadap etnis Gypsy masih ada. Sedangkan, lain halnya dengan pengungsi perang Yugoslavia tahun 1990-an yang mana Hongaria tidak bersikap xenophobia dengan menerima pengungsi perang Yugoslavia dengan tangan terbuka.

B.1. Xenophobia Terhadap Pengungsi Timur Tengah

Gelombang pengungsi Timur Tengah yang datang ke Eropa mencapai puncaknya tahun 2015, yaitu dengan lebih dari satu juta pengungsi yang datang. Hongaria menjadi pintu utama pengungsi yang ingin ke negara Uni Eropa melalui jalur timur. Hal ini sebagai konsekuensi dari Regulasi Dublin yang menjadikan negara pertama yang didatangi pengungsi yang bertanggung jawab dalam menyeleksi pengungsi. Pengungsi yang datang ke Hongaria mencapai setidaknya 400.000 jiwa.



Grafik 4.1 Data pencari suaka yang datang ke Hongaria

(Juhász & Molnár, European refugee crisis: the special case of Hungary in it, 2016)

Data tersebut merupakan jumlah pencari suaka yang datang ke Hongaria dari tahun ke tahun. Puncak dari pencari suaka yang datang ke Hongaria pada tahun 2015 dengan hampir 180.000 jiwa pencari perlindungan internasional. Hal ini cukup signifikan dibandingkan tahun 2014 dimana Hongaria kedatangan sekitar 40.000 pencari suaka (Juhász & Molnár, European refugee crisis: the special case of Hungary in it, 2016). Ini sejalan dengan krisis pengungsi di negara Eropa lain pada saat itu.

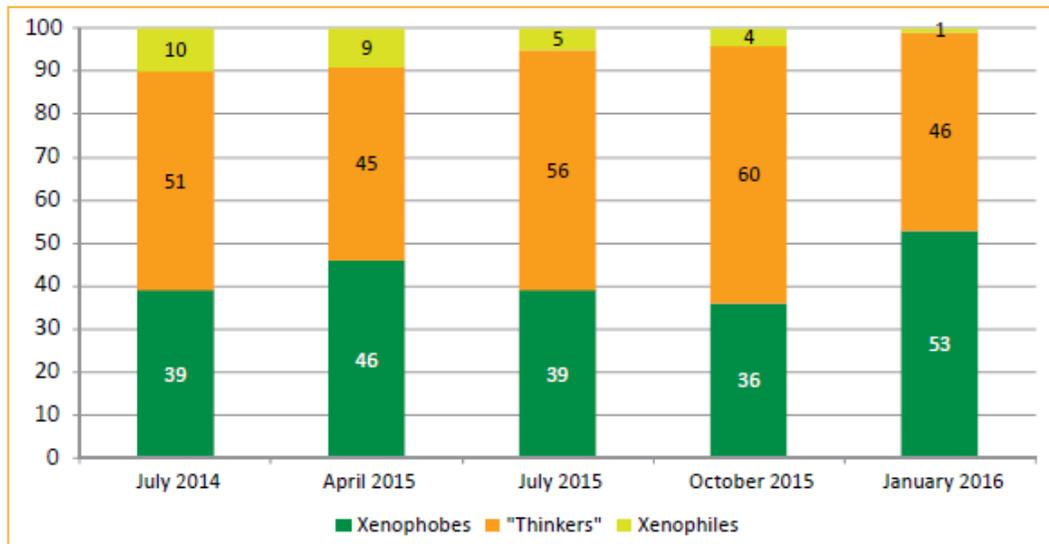
Sesuai dengan CEAS, maka baik penerima status sebagai pengungsi maupun *subsidiary protection*, akan mendapatkan kebutuhan dasar yang diberikan oleh negara penerima. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara penerima seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sesuai dengan *Refugee Convention 1951* juga, negara penerima berkewajiban untuk mengintegrasikan pengungsi dengan warga negaranya.

Masyarakat Hongaria sendiri merupakan masyarakat yang homogen yang didominasi oleh etnis Hongaria. Ini dibuktikan dengan data tahun 2016 yang menyebutkan bahwa etnis Hongaria mencapai 85.6% dari jumlah seluruh penduduk Hongaria (Index Mundi, 2016). Sehingga, masyarakat Hongaria cenderung mengikuti nilai dan norma yang berasal dari etnis Hongaria.

Tárki, badan riset independen di Hongaria melakukan riset tentang tanggapan masyarakat terhadap pengungsi yang datang ke Hongaria. Riset ini dirilis dengan judul “The Social Aspects of the 2015 Migration Crisis in Hungary”.

Xenophobia merupakan prasangka buruk yang kuat terhadap orang asing, xenophilia merupakan ketertarikan terhadap orang asing, sedangkan thinkers yang belum memutuskan apakah pro ataupun kontra terhadap orang asing. Ketiga kategori tersebut dapat menunjukkan bagaimana respon masyarakat Hongaria terhadap pengungsi.

Pengungsi merupakan orang asing yang datang ke Hongaria, terlebih pengungsi didominasi datang dari Timur Tengah. Sehingga, parameter xenophobia, xenophilia, dan thinker akan mampu menjadi parameter prasangka masyarakat Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah.



Source: TÁRKI Omnibus 2014–2016.

Grafik 4.2 Tingkat Xenophobia di Hongaria

(Sik, 2016)

Data di atas dimulai sejak tahun 2014 dimana Hongaria mulai menunjukkan kebijakan anti pengungsi. Hal ini juga diikuti dengan krisis pengungsi yang semakin memuncak pada tahun 2015, hingga tahun 2016 dimana krisis pengungsi masih terjadi.

Berdasarkan data di atas, masyarakat Hongaria cenderung tidak tertarik dengan orang asing, dengan proporsi tertarik dengan orang asing tidak lebih dari 10%. Sedangkan xenophobia cenderung naik-turun dari Juli 2014 hingga Januari 2016 yang puncaknya pada Januari 2016 dengan 53% masyarakat Hongaria mengaku xenophobia. Thinkers juga proporsinya naik-turun yang mengalami puncaknya dengan 60% pada Oktober 2016 (Sik, 2016).

Xenophobia sangat terkait dengan perasaan terancam akan datangnya orang

asing. Umumnya manusia tidak akan memberikan toleransi terhadap kelompok luar yang memberikan ancaman terhadap kelompoknya (Juhász, Hunyadi, & Zgut, Focus on Hungary: Refugees, Asylum and Migration, 2015). Sehingga, penolakan Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah didasarkan oleh adanya prasangka buruk yang kuat dari masyarakatnya serta adanya ancaman terhadap orang asing.

Sebuah prasangka buruk terhadap orang asing tersebut terkonstruksikan dari nilai, norma, serta budaya Hongaria. Prasangka buruk membuktikan adanya suatu pertentangan antara nilai, norma, dan budaya Hongaria dengan pengungsi yang didominasi berasal dari Timur Tengah. Terlebih lagi, masyarakat Hongaria merupakan masyarakat yang homogen yang terbiasa hidup dengan kesamaan kultur Hongaria. Sehingga, data tersebut membuktikan adanya ketakutan warga Hongaria terhadap orang asing.

Banyak pertentangan nilai, norma, serta budaya masyarakat Hongaria dengan pengungsi Timur Tengah. Pengungsi Timur Tengah memiliki kepercayaan Islam serta budaya Arab yang kuat. Sedangkan masyarakat Hongaria memiliki kepercayaan Kristen serta budaya Eropa yang telah mengakar lama.

Pengungsi Timur Tengah sangat menjunjung nilai kehormatan, seperti aturan berpakaian. Sedangkan, masyarakat Hongaria tidak memiliki kepercayaan akan aturan berpakaian. Masyarakat Hongaria memiliki kebebasan atas pakaian apa yang akan mereka gunakan. Bagi masyarakat Hongaria, nilai kehormatan dijunjung tidak harus ditunjukkan dengan aturan berpakaian yang kaku.

Bahkan, nilai kebebasan sangat dinikmati di Hongaria yang merupakan salah

satu nilai yang dihargai di Hongaria. Ini berkaitan dengan ajaran agama Kristen yang mengungkapkan bahwa kebebasan boleh dinikmati asalkan bertanggung jawab dengan Tuhan. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas selama tidak bersinggungan dengan kebebasan orang lain serta perlindungan hak asasi manusia. Berbeda dengan nilai, norma, serta budaya Islam dan Arab di Timur Tengah yang membatasi kebebasan seseorang.

Nilai keadilan tentang posisi pria dan wanita antara Hongaria dan pengungsi Timur Tengah juga berbeda. Ajaran Islam menyebutkan bahwa pria diutamakan dalam memimpin umat. Sehingga, wanita cukup dibatasi perannya dalam masyarakat. Tidak mengherankan bahwa budaya patriarki Arab cukup kuat dengan membatasi hak-hak wanita. Sedangkan, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan budaya *ladies first* Hongaria yang sangat mengapresiasi wanita. Apalagi budaya pernikahan anak Arab yang kurang bisa diterima oleh nilai dan norma Hongaria. Hal ini berkaitan dengan menikah di usia anak-anak yang merenggut hak anak itu sendiri.

Pergaulan antara pria dan wanita dalam masyarakat Hongaria juga aturannya tidak sebegitu ketat seperti budaya di Arab. Budaya mencium tangan wanita oleh pria di Hongaria dianggap sebagai bentuk penghormatan pria atas wanita, sedangkan mencium tangan wanita oleh pria di Arab dilarang jika bukan muhrim (suami atau keluarga milik wanita).

Hongaria berkomitmen akan melindungi budaya Hongaria. Hal tersebut tertulis dalam pembukaan konstitusi dasar Hongaria:

We commit to promoting and safeguarding our heritage, our unique language, Hungarian culture, the languages and cultures of nationalities living in Hungary, along with all man-made and natural assets of the Carpathian Basin. We bear responsibility for our descendants; therefore we shall protect the living conditions of future generations by making prudent use of our material, intellectual and natural resources. (Hungarian Government, 2013)

Budaya Hongaria juga mengakar dari nilai dan norma Kristen dan budaya Eropa. Hal ini berkaitan dengan budaya Hongaria yang merupakan aset dari kerajaan Kristen Katolik Hongaria dan menjadi bagian dalam peradaban Eropa pada masa lalu. Walaupun Hongaria tidak pernah menyatakan Hongaria adalah negara Kristen, namun Hongaria sangatlah bangga dengan histori negara Kristen Katolik yang dulu pernah terbentuk di Hongaria tahun 1000. Hongaria juga bangga akan bagian dari peradaban Eropa. Kebanggaan akan hal tersebut sangatlah jelas tertulis pada pembuka konstitusi dasar Hongaria :

We are proud that our king Saint Stephen built the Hungarian State on solid ground and made our country a part of Christian Europe one thousand years ago.

We recognise the role of Christianity in preserving nationhood. We value the various religious traditions of our country. (Hungarian Government, 2013)

Maka, Hongaria sangat bangga akan nilai Kristen yang menyatukan negara Hongaria. Kebanggaan akan Kristen tersebut dinilai penting, sehingga haruslah dijaga. Nilai dan norma Kristen tersebut menjadi kewajiban bagi Hongaria untuk melindunginya dari nilai, norma, serta budaya asing yang mencoba masuk. Hal ini berkaitan akan adanya ancaman nilai dan norma lain yang datang yang akan

merubah nilai dan norma Kristen yang sangat berarti bagi Hongaria.

Hongaria berkomitmen melindungi nilai dan norma Kristen serta budaya Hongaria. Bentuk dari komitmen tersebut adalah salah satunya dengan menghalangi budaya asing datang secara masif di Hongaria. Budaya masif datang dari banyaknya orang asing yang datang dan menetap ke Hongaria.

Hongaria menganggap bahwa ketika banyaknya orang asing di Hongaria yang datang menetap akan membuat budayanya terancam. Hal ini berkaitan dengan sifat alamiah manusia untuk membawa dan mengimplementasikan budaya mereka dimanapun mereka berada. Sehingga, menghalau orang asing datang menetap yang membawa budaya asing adalah salah satu cara untuk mempertahankan budaya asli Hongaria. Salah satu cara menghalau orang asing datang menetap adalah dengan menghalau pengungsi masuk ke Hongaria, terutama pengungsi Timur Tengah.

Ted Hoft menyebutkan bahwa identitas suatu negara dalam politik dunia adalah sedikit banyaknya merupakan kebiasaan sosial yang merupakan identitas dalam rumah (Hofp, 1998). Nilai dan norma dari dalam rumah tersebut terkonstruksi, sehingga menjadi kebenaran umum. Sehingga, nilai dan norma yang ada lama di Hongaria menjadikan kunci akan kebijakan penolakan Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah.

Viktor Orbán menyebutkan bahwa Eropa dan budaya Eropa memiliki akar Kristen. Sedangkan pengungsi mayoritas berasal dari Timur Tengah yang memiliki akar Islam mengancam identitas Eropa (Noack, 2015). Sehingga, perlu tindakan untuk membendung gelombang pengungsi Timur Tengah yang datang ke

Eropa untuk melindungi identitas Eropa.

Masyarakat Hongaria memiliki karakter berjuang sampai mati terhadap apa yang diyakininya. Maka, masyarakat Hongaria akan melindungi dan memperjuangkan keyakinan dan kebanggaan nilai dan norma Kristen dan budaya Hongaria tersebut dengan cara apapun. Hal ini diimplementasikan dengan penolakan keras Hongaria atas pengungsi Timur Tengah. Hongaria bahkan juga menolak proposal Uni Eropa dalam pembagian kuota penerimaan suaka yang tertulis pada Council Decision (EU) 2015/1523.

Hongaria juga memiliki sikap *soft-Eurosceptic* terhadap Uni Eropa, yaitu adanya skeptis terhadap Uni Eropa. Skeptis Hongaria terhadap Uni Eropa adalah ketika kebijakan Uni Eropa bertentangan dengan kepentingan nasional Hongaria. Bagi Hongaria, Uni Eropa seharusnya memiliki beberapa batasan yang seharusnya tidak Uni Eropa langkahi sebagai organisasi regional.

Hongaria yang pada dasarnya cukup keras dalam memperjuangkan keyakinannya, memperkuat posisi penolakan dengan mengancam Uni Eropa bersama negara-negara Visegrad (Republik Ceko, Hongaria, Polandia, Slovakia). Hongaria dan negara-negara Visegrad menganggap resolusi Uni Eropa tersebut bukanlah resolusi yang solutif. Negara-negara Visegrad mengungkapkan pada *joint statement* di Bratislava pada 23 Juni 2015 bahwa kuota penerimaan suaka tersebut tidak bisa diterima (Virostkova, 2015). Hongaria juga mengancam Uni Eropa bahwa Hongaria tidak akan segan menanggukkan Regulasi Dublin yang diatur oleh Uni Eropa jika Uni Eropa tetap memaksakan kuota penerimaan suaka.

Demi menguatkan pernyataan penolakan pembagian kuota penerimaan suaka,

Hongaria mengadakan referendum apakah menerima atau menolak pembagian penerimaan suaka Uni Eropa pada 2 Oktober 2016. Walaupun hanya 43.7% masyarakat Hongaria yang ikut referendum, 92% masyarakat Hongaria yang ikut referendum menyatakan penolakan terhadap kuota pengungsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Hongaria banyak juga yang menolak pengungsi Timur Tengah.

Disamping itu, data juga membuktikan bahwa tensi xenophobia masyarakat Hongaria cukup tinggi terhadap pengungsi, terutama pengungsi Timur Tengah. Hal ini berkaitan dengan perbedaan mencolok masyarakat Hongaria dengan pengungsi Timur Tengah yang memiliki nilai dan norma yang cukup bertentangan. Sehingga, ini menguatkan posisi Hongaria untuk menolak pengungsi Timur Tengah.

Konstruktivis memiliki tiga mekanisme bagaimana struktur normatif dan ide membentuk identitas dan kepentingan aktor: *imagination*, *communication*, *constraint*. Mekanisme pembentukan struktur dan ide *imagination* Hongaria adalah melindungi nilai dan norma Kristen serta budaya Hongaria. Perlindungan tersebut dilakukan dengan menghalau nilai dan norma asing serta budaya asing yang datang, terutama pengungsi Timur Tengah yang memiliki nilai, norma, serta budaya yang berbeda dengan Hongaria. *Communication* Hongaria adalah dengan mengamandemen *Asylum Act CXXVII* yang mengatur tentang pengadaan tembok pembatas di perbatasan Hongaria untuk menghalau pengungsi masuk. Hongaria juga tidak segan memberikan hukuman terhadap pengungsi yang berusaha masuk secara ilegal dengan mengamandemen *Criminal Code and the Act on Criminal*

Procedure Act CXL. Sedangkan *constraint* dari Hongaria adalah adanya paksaan moral untuk menolak pengungsi Timur Tengah dengan menolak pembagian kuota pengungsi dari Uni Eropa. Pemaksaan patuh akan pendirian Hongaria ini diperkuat dengan pengadaan referendum untuk menolak pembagian kuota pengungsi dari Uni Eropa.

Berdasarkan pernyataan Ted Hoft tentang sikap dalam politik dunia adalah kebiasaan yang merupakan identitas di dalam rumah, maka penolakan berasal dari dalam Hongaria. Penolakan Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah berdasarkan nilai, norma, serta budaya pengungsi Timur Tengah yang tidak dapat diterima oleh nilai, norma, serta budaya Hongaria. Hongaria sangat bangga akan nilai dan norma Kristen yang menyatukan negara Hongaria serta budaya Hongaria yang menjadi bagian dari peradaban Eropa, maka Hongaria melindunginya dengan cara apapun. Hal ini terlebih masyarakat Hongaria yang memiliki karakter untuk berjuang habis-habisan akan keyakinan yang dimilikinya.

B.2. Xenophobia Terhadap Etnis Gypsy

Xenophobia atau persepsi buruk terhadap orang asing bukanlah yang pertama kali. Hal ini pernah dan bahkan sedang terjadi di Hongaria terhadap etnis Roma (Gypsy). Hal ini berkaitan dengan kegagalan integrasi etnis Gypsy di Hongaria.

Etnis Gypsy merupakan etnis minoritas terbesar di Hongaria. Etnis Gypsy yang hidup di Hongaria sekitar 316 ribu jiwa atau sekitar 3.2% dari total penduduk Hongaria (Index Mundi, 2016).

Hongaria mengakui 12 etnis minoritas lainnya di Hongaria, disamping etnis

Gypsy. Etnis lainnya adalah etnis Jerman, etnis Slovakia, etnis Kroasia, etnis Romania, etnis Ukraina, etnis Serbia, etnis Slovenia, etnis Polandia, etnis Yunani, etnis Bulgaria, etnis Rusyn, serta etnis Armenia. Walaupun banyak etnis minoritas yang diakui, Hongaria merupakan homogen dengan komposisi 85.6% penduduk Hongaria adalah etnis Hongaria (Index Mundi, 2016).

Etnis Gypsy berasal dari daerah India. Ini dibuktikan dengan bahasa Romani, yaitu bahasa sehari-hari etnis Gypsy yang mirip dengan bahasa India. Etnis Gypsy memiliki budaya yang mengakar dari budaya Hindu yang dimodifikasikan dengan agama yang dianut etnis Gypsy. Misalnya budaya Sakta yang berasal dari agama Hindu. Budaya ini melakukan pemujaan terhadap Sakta, yaitu Ibu Dewi umat Hindu. Namun, untuk etnis Gypsy yang bergama Kristen, memodifikasi ajaran ini dengan pemujaan terhadap Bunda Maria.

Etnis Gypsy mulai berdatangan ke Hongaria sekitar abad ke-14 dan abad ke-15. Namun gelombang imigrasi etnis Gypsy meningkat saat abad ke-19 ketika perkembangan kapitalisme di Eropa (Hungary, 2004). Eropa saat itu ekonominya sangat berkembang yang membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga etnis Gypsy banyak berdatangan ke Eropa.

Masyarakat Hongaria memiliki prasangka yang buruk terhadap etnis Gypsy. Hal ini berkaitan dengan etnis Gypsy yang menganggap dirinya berbeda dengan masyarakat Hongaria lainnya. Etnis Gypsy memiliki panutan hidup sendiri yang mengakar dari ajaran Hindu dan tidak menerima nilai dan norma Hongaria.

Bagi pandangan etnis Gypsy, pendidikan bukanlah hal utama yang diprioritaskan. Hal ini dibuktikan dengan angka putus sekolah anak-anak etnis

Gypsy juga tinggi. Banyak dari mereka yang hanya menyelesaikan sekolah dasar. Bahkan, data dari pemerintah Hongaria tahun 2004 hanya sekitar 0.3% etnis Gypsy yang menyelesaikan pendidikan hingga bangku kuliah (Hungary, 2004). Oleh sebab itu, kesempatan kerja bagi etnis Gypsy juga terbatas. Maka, pengangguran dan kemiskinan etnis Gypsy juga cukup tinggi. Sehingga, etnis Gypsy dikenal sebagai etnis yang kurang mumpuni dari segi ekonomi di Hongaria. Disamping itu, etnis Gypsy juga mendapatkan persepsi tidak berpendidikan karena hanya sedikit dari mereka yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Pemerintah Hongaria telah berusaha melindungi dan mengintegrasikan etnis minoritas di Hongaria, termasuk etnis Gypsy. Oleh sebab itu pemerintah memiliki kebijakan khusus untuk etnis minoritas di Hongaria, yaitu *Minority Self-Government* (MSG).

MSG dibentuk tahun 1993 yang memberikan otoritas terhadap 13 etnis minoritas yang diakui untuk membentul *self-government* lokal, regional, nasional. MSG sendiri dibentuk sebagai wujud apresiasi budaya minoritas dan memenuhi kewajiban untuk melindungi hak-hak minoritas. MSG memiliki hak mengatur pendidikan lokal, penggunaan bahasa di institusi umum, media cetak dan elektronik, serta perlindungan terhadap budaya dan tradisi (Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE/ODIHR), 2006).

Selain MSG, pemerintah Hongaria telah memberikan kebijakan khusus lainnya terhadap etnis Gypsy, seperti subsidi biaya sekolah. Namun, etnis Gypsy

masih sulit membaaur dengan masyarakat Hongaria.

Etnis Gypsy tinggal di daerah dimana hanya kelompoknyalah yang tinggal. Sehingga, ini membatasai interaksi dengan etnis Hongaria maupun etnis lainnya di Hongaria. Hal ini yang yang mendorong segregasi etnis Gypsy di Hongaria.

Walaupun Hongaria mengakui adanya etnis Gypsy di Hongaria, namun Hongaria terus mendorong setiap etnis minoritas, terutama Gypsy untuk menerima nilai dan norma Hongaria. Namun, etnis Gypsy bersikukuh untuk hidup dengan cara mereka sendiri dengan nilai dan norma yang mengakar dari ajaran Hindu yang mereka percayai. Sikap inilah yang menghambat integrasi etnis Gypsy di Hongaria.

Secara umum etnis Gypsy dianggap stratanya di bawah dari masyarakat Hongaria. Sehingga, etnis Gypsy yang sudah lama tinggal di Hongaria sulit untuk terintegrasi dengan masyarakat Hongaria menjadi pekerjaan rumah pemerintah Hongaria.

Etnis Gypsy memang memiliki nilai dan norma berbeda dengan masyarakat Hongaria. Ini mendorong terhambatnya integrasi etnis Gypsy di Hongaria. Bahkan, integrasi yang terhambat ini menjadikan persepsi buruk terhadap etnis Gypsy yang dianggap tidak mau membaaur dengan masyarakat Hongaria.

Kasus etnis Gypsy membuktikan bahwa masyarakat Hongaria sangatlah peduli dengan melindungi nilai, norma, dan budaya Kristen dan Eropa Hongaria. Sehingga, Hongaria berusaha melakukan berbagai cara agar etnis Gypsy menerima nilai, norma, serta budaya Hongaria. Hingga saat ini, integrasi etnis Gypsy di Hongaria masih menjadi masalah bagi Hongaria. Padahal, etnis Gypsy

sudah mendiami wilayah Hongaria lebih dari 500 tahun. Maka, pengungsi Timur Tengah yang berbondong-bondong mengungsi ke Hongaria akan menjadi masalah baru. Sehingga, Hongaria melakukan penolakan terhadap pengungsi, terutama pengungsi Timur Tengah yang memiliki nilai, norma, dan budaya yang berbeda dengan Hongaria.

B.3. Xenophilia Terhadap Pengungsi Korban Perang Yugoslavia

Pada saat perang Yugoslavia tahun 1991-1995, Hongaria membuka pintu negaranya untuk pengungsi korban perang Yugoslavia. Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan nilai dan norma kekristenan serta budaya Eropa yang sama-sama dianut oleh Hongaria dan pengungsi perang Yugoslavia. Sehingga, ini yang mendorong xenophilia atau ketertarikan terhadap orang asing dengan menerima pengungsi Yugoslavia dengan tangan terbuka Hongaria pada saat itu.

Yugoslavia merupakan negara multi-etnis yang berbatasan langsung dengan Hongaria di bagian selatan Hongaria. Yugoslavia mulai mengalami pergolakan semenjak Presiden Joseph Broz Tito meninggal pada tahun 1980. Sejak saat itu, Yugoslavia menjadi negara yang tidak stabil. Hal inilah yang memicu perang Yugoslavia pada tahun 1990 karena adanya disintegrasi ditambah tidak ada pemimping yang sekuat Presiden Tito.

Perang Yugoslavia menimbulkan banyaknya masyarakat Yugoslavia mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Hongaria menjadi salah satu negara tujuan para pengungsi perang Yugoslavia. Hal ini berkaitan dengan Hongaria yang letaknya hanya bersebelahan dengan Yugoslavia di bagian utara. Hongaria

membuka pintu terhadap pengungsi Yugoslavia pada saat itu. Kebijakan pemerintah Hongaria juga dapat dibilang istimewa.

Hongaria memberikan opsi kewarganegaraan bagi pengungsi perang Yugoslavia yang mengungsi setelah tinggal secara legal minimal 3 tahun di Hongaria. Padahal, negara lain rata-rata memberikan kewarganegaraan terhadap pengungsi setelah tinggal secara legal 8 tahun di negaranya. Faktanya dua per tiga dari 6500 pengungsi Yugoslavia yang diakui oleh Hongaria mendapatkan kewarganegaraan Hongaria (Klenner & Szép, 2010).

Selain itu, pengungsi memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama dengan masyarakat Hongaria. Para pengungsi tidak perlu izin atau menggunakan registrasi khusus untuk bekerja, mereka juga dijamin kesejahteraannya oleh pemerintah Hongaria. Hal yang membedakan dengan masyarakat Hongaria adalah pengungsi Yugoslavia tidak memiliki hak pilih politik di Hongaria, menjadi pegawai negeri, memiliki kantor, serta hal-hal lain yang mengharuskan warga negara Hongaria sebagai syarat hukum (Klenner & Szép, 2010).

Yugoslavia sendiri memiliki penduduk yang mayoritas beragama Kristen. Sehingga, masyarakat Yugoslavia mengamalkan nilai dan norma Kristen sebagai jalan hidup sehari-hari. Seperti yang telah diketahui bahwa Hongaria merupakan negara yang mengapresiasi nilai dan norma Kristen. Adanya persamaan nilai dan norma Kristen tersebut yang mendorong masyarakat Hongaria untuk menerima pengungsi perang Yugoslavia.

Selain itu, dari segi historis, beberapa wilayah Yugoslavia, yaitu yang sekarang merupakan negara Slovenia dan Kroasia sempat pernah di bawah

pengaruh Kerajaan Hongaria di masa lalu. Sehingga, dulu masyarakat wilayah tersebut juga pernah berjuang dalam mempertahankan Kristen barat dari pengaruh Ottoman Turki. Hal ini menjadikan adanya ikatan budaya juga yang mirip.

Yugoslavia juga merupakan bagian dari peradaban Eropa. Maka, budaya Yugoslavia juga merupakan perpanjangan tangan dari budaya Eropa, seperti budaya mengapresiasi wanita. Hal ini yang semakin memperkuat keputusan Hongaria untuk menerima pengungsi perang Yugoslavia.

Hal tersebut sesuai dengan Ted Hoft dan Peter J. Katzenstein menekankan bahwa perilaku negara terkonstruksi dalam norma dan nilai domestik negara. Kesamaan nilai dan norma Kristen yang menjadikan dasar keputusan Hongaria yang menerima pengungsi perang Yugoslavia dengan tangan terbuka.

Hal ini cukup berbeda dengan krisis pengungsi yang mana pengungsi didominasi oleh pengungsi Timur Tengah. Pemerintah Hongaria bersikap menolak pengungsi tersebut karena nilai, norma, dan budaya yang dianut pengungsi Timur Tengah tersebut berbeda dengan nilai, norma, dan budaya Hongaria.